

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara berkembang yang mempunyai kompleksitas pada kehidupan sosial dan ekonominya. Hasil dari aktivitas sosial dan ekonomi akan meninggalkan residu yang biasanya disebut dengan sampah. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Masalah akan timbul jika sampah tidak terkelola dengan benar.

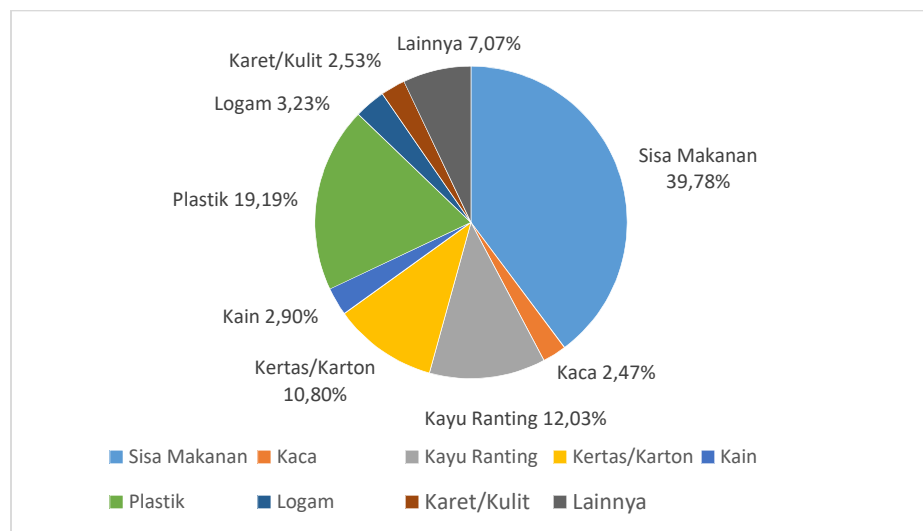


Gambar 1. 1. Grafik Timbulan Sampah di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Masalah yang diakibatkan oleh banyaknya sampah berkaitan dengan lingkungan hidup. Pengaruh sampah yang tidak dikelola dengan baik terdapat pada penurunan kualitas lahan, air, dan udara di wilayah sekitar. Pengelolaan sampah yang tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan pencemaran pada air

permukaan dan air tanah, memakan lahan-lahan untuk dijadikan TPA, hingga membuat polusi udara karena bau dan gas yang ditimbulkan. Hal itu akan berdampak secara sosial dan ekonomi, baik dalam waktu dekat maupun lama.



Gambar 1. 2. Jenis Sampah di Indonesia Tahun 2023

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Permasalahan sampah juga secara langsung memberikan kerugian kepada negara. Pada tahun 2023, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kerugian yang diakibatkan oleh sampah plastik di lautan dapat mencapai 225 triliun yang melingkupi pada ekonomi, pariwisata, kesehatan, dan dampak teknis yang lain. Kemudian Bappenas juga menyatakan bahwa perkiraan kerugian ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh sampah makanan mencapai 213 sampai dengan 551 triliun rupiah. Apalagi sampah makanan juga berkontribusi sebesar 8-10 persen terhadap produksi emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia. Sehingga bisa dilihat bahwa pengelolaan sampah yang tidak optimal dapat berkontribusi secara langsung pada permasalahan lintas sektor di semua lini kehidupan.

Tabel 1. 1. Timbulan Sampah Provinsi di Indonesia Tahun 2023

No.	Provinsi	Timbulan Sampah (ton)	Penanganan Sampah (ton)
1.	Jawa Timur	6.117.220	2.662.246
2.	Jawa Tengah	5.510.974	2.175.906
3.	Jawa Barat	4.279.095	2.411.468
4.	DKI Jakarta	3.141.650	2.277.461
5.	Banten	2.037.973	1.005.785

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki timbulan sampah terbanyak di Indonesia berdasarkan Tabel 1.1. Namun, jika dilihat lebih rinci, penanganan sampah di Jawa Tengah memiliki data yang lebih rendah dibandingkan dengan empat provinsi lainnya yaitu sebesar 39,5%. Hal tersebut bisa saja membuktikan bahwasanya proses penanganan sampah yang terdiri atas pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah di Provinsi Jawa Tengah perlu ditingkatkan.

Sampah di Jawa Tengah didominasi oleh sampah yang bersumber dari rumah tangga. Kontribusi sampah rumah tangga sebesar 52% dari sampah yang dihasilkan di Jawa Tengah. Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah perlu memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat terkait dengan pemilahan sampah pada lingkup rumah tangga. Namun, hal tersebut juga harus mendapatkan dukungan dari sistem pengelolaan sampah di daerah. Masih banyak ditemukan bahwa pengangkutan sampah dilakukan tidak sesuai dengan pemilahan sampah yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga proses pemilahan sampah yang sudah dilakukan pada sumber sampah menjadi percuma.

Tabel 1. 2. Jumlah Sampah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah (ton)
1.	Kota Semarang	431.534
2.	Kabupaten Brebes	366.937
3.	Kabupaten Cilacap	348.406
4.	Kabupaten Grobogan	315.050
5.	Kabupaten Demak	267.884

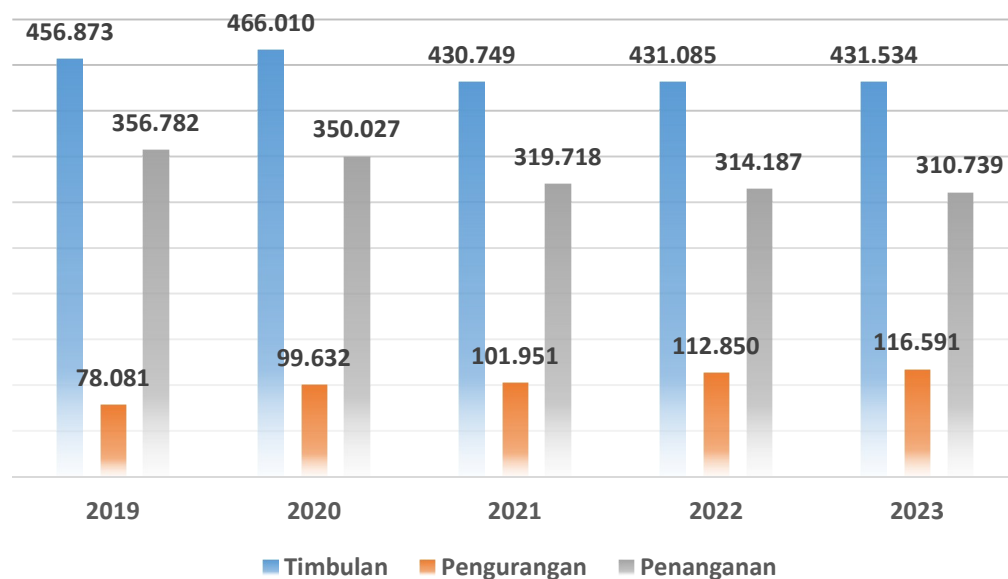
Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Kota Semarang merupakan daerah yang memiliki timbulan sampah tertinggi diantara Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah karena dikabarkan tempat pemrosesan akhir akan segera *overload* sehingga memerlukan cara lain dalam pengolahan sampah di TPA Jatibarang. Hal ini bisa dikatakan sebagai hal yang wajar karena Kota Semarang merupakan kota metropolitan yang memiliki variasi kegiatan sosial ekonomi dengan jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya.

Masa covid-19 di tahun 2020 hingga tahun 2022, berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Kota Semarang tidak terjadi penurunan jumlah timbulan sampah yang signifikan. Apalagi sekarang Kota Semarang memiliki pertumbuhan ekonomi yang progresif, yang tentu saja aktivitas ekonomi tersebut menghasilkan sampah. Dan pertumbuhan ekonomi ini akan terus digenjot oleh Pemerintah Kota Semarang karena adanya rencana untuk meningkatkan ekonomi melalui industri modern.

Pengurangan sampah di Kota Semarang menunjukkan angka yang cukup baik. Dari tahun ke tahun sudah menunjukkan angka pengurangan sampah dari semula di tahun 2019 sebesar 78.081 ton dan di tahun 2023 mencapai 116.591 ton.

Hal tersebut bisa menjadi salah satu perbaikan yang positif di Kota Semarang karena kebijakan pengurangan sampah yang cukup efektif dan konsisten tiap tahunnya. Pengurangan sampah ini diterapkan melalui pemanfaatan kembali sampah tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

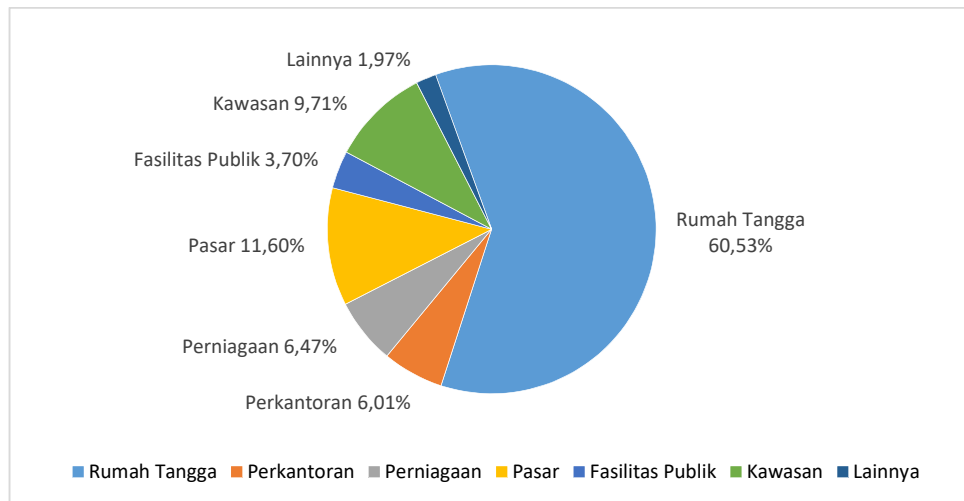


Gambar 1. 3. Data Pengelolaan Sampah di Kota Semarang Tahun 2019-2023

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Penanganan sampah di Kota Semarang masih terlalu banyak yang diangkut menuju TPA Jatibarang. Di tahun 2023, sekitar 99,9% sampah yang termasuk ke dalam proses penanganan sampah masuk ke dalam tahap pemrosesan akhir di TPA. Hal itu cukup disayangkan karena pada proses penanganan sampah terdiri atas pemilahan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Apalagi ditambah dengan kurang komitmennya petugas sampah dan masyarakat dalam menerapkan pemisahan sampah organik, anorganik, dan sampah limbah. Pada proses pengangkutan dari TPS ke TPA, diungkapkan langsung oleh salah satu

pegawai di Subbag Tata Usaha TPA Jatibarang, sampah yang diangkut ke TPA merupakan sampah campuran yang terdiri dari banyak jenis sampah rumah tangga.



Gambar 1. 4. Sumber Sampah di Kota Semarang Tahun 2023

Sumber: sipsn.menlhk.go.id

Sebagian besar sampah yang dihasilkan di Kota Semarang bersumber dari rumah tangga. Pada komposisinya, sampah di Kota Semarang juga didominasi oleh sampah-sampah organik. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan permasalahan sampah secara sepihak, perlu partisipasi individu untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sampah domestik atau rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat seharusnya secara langsung terlibat dalam pengolahan sampah rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, bank sampah merupakan salah satu alternatif tempat pengelolaan sampah yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah. Sebagai tempat pengelolaan sampah, bank sampah dapat melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa

peran bank sampah cukup komprehensif jika diselenggarakan dengan baik dengan fasilitas pendukung dan tata kelola yang sudah matang.

Dukungan dari pemerintah dan peran aktif masyarakat terhadap bank sampah berpengaruh terhadap operasional bank sampah (Pavitasari & Septiarani, 2023). Pada beberapa penelitian terdahulu, peran pemerintah sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan bank sampah, pemerintah dapat memberikan fasilitas yang berbentuk fisik maupun non-fisik seperti pelatihan, pendampingan, dan kemitraan. Juga dengan peran masyarakat sebagai pengurus bank sampah maupun sebagai nasabah yang memiliki sampah sama pentingnya dalam mendukung operasionalisasi bank sampah. Peran optimal dari keduanya akan membantu untuk menciptakan lingkungan yang sehat sekaligus berkontribusi positif terhadap perekonomian negara.

Di Kota Semarang, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Hal ini didasarkan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 yang mana memiliki Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan. Pada pelaksanaan tugasnya, bidang tersebutlah yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program bank sampah di Kota Semarang.

Pada bulan Desember 2023, Kepala DLH Kota Semarang menyebutkan terdapat 497 bank sampah aktif di Kota Semarang. Sejumlah 375 dari 497 bank sampah aktif tersebut merupakan bank sampah rintisan. Pemkot Semarang melalui DLH melakukan pendampingan secara aktif dan melakukan percontohan. Keberhasilan program ini diharapkan dapat mendorong partisipasi di setiap level

mulai dari RT hingga kecamatan. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli lingkungan sekaligus berdampak positif pada pengurangan sampah.

Tabel 1. 3. Data Jumlah Bank Sampah, Pengurangan Sampah, dan Penanganan Sampah di Kota Semarang Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah bank sampah yang beroperasi	34	47	47	225	497
Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya	18,36%	22%	24%	26,4%	27,1%
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya	77,64%	75%	74%	73,31%	72,1%

Sumber: RKPD Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 dapat dilihat bahwasanya penambahan jumlah bank sampah yang ada di Kota Semarang tidak berkontribusi signifikan terhadap pengelolaan sampah. Penambahan bank sampah yang begitu masif belum memperlihatkan perbaikan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Padahal bank sampah dapat menjadi gerbang pertama pemilahan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali maupun didaur ulang menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Namun di sisi lain, banyak warga yang enggan berkontribusi aktif, baik sebagai pengelola maupun nasabah, dikarenakan manfaat yang diperoleh tidak lebih besar dibandingkan ketidaknyamanan yang dirasakan (Sarasati, 2024).

Didasarkan pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2019, DLH diberikan berbagai amanah berkaitan dengan bank sampah. Perkada tersebut berisikan tentang kebijakan dan strategi daerah Kota Semarang dalam pengelolaan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. DLH Kota Semarang diberikan tugas diantaranya mendirikan Bank Sampah Induk Kota Semarang, mendirikan bank sampah unit di masyarakat, mengintegrasikan data jejaring operasional bank sampah dan TPS3R dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Daerah, dan integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup agar bisa mendapatkan KUR.

Pada tahun 2024, Wali Kota Semarang mengeluarkan Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Secara spesifik, DLH Kota Semarang memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan pembentukan bank sampah. Regulasi-regulasi di atas menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank sampah sebagai salah satu bagian dari pengelolaan sampah daerah.

Menurut penuturan dari pegawai DLH Kota Semarang, Tomi Indra, urgensi didirikannya bank sampah adalah supaya terdapat pemilahan sampah dari hulu. Pemilahan tersebut akan berefek secara langsung kepada pengurangan sampah yang terangkut ke TPA Jatibarang. Namun di sisi lain, pemilahan sampah di hulu ini juga menemui berbagai permasalahan seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di beberapa wilayah.

Perbedaan karakteristik masyarakat menjadi tantangan sekaligus hambatan pada pelaksanaan program bank sampah. Pada wilayah perkotaan seperti di Kecamatan Semarang Tengah cenderung lebih sulit untuk mendirikan bank sampah dibandingkan dengan wilayah seperti Gunungpati. Bukan berarti situasi tersebut

menunjukkan kurangnya kesadaran dan keguyuban masyarakat, tetapi faktor dimana laki-laki dan perempuan yang bekerja dan perbedaan latar belakang maupun budaya menjadikan situasi sosial di tiap wilayah menjadi berbeda. Oleh karena itu, pendirian bank sampah di wilayah-wilayah tertentu menjadi sulit dilakukan. Sekalipun sudah berdiri bank sampah unit, terkadang masih belum dapat konsisten dalam penyelenggaraan bank sampah.

DLH Kota Semarang sudah melakukan berbagai cara seperti monitoring dan sosialisasi. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan penguatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, yang mana bukan hanya untuk bank sampah, tetapi juga masyarakat dan pengusaha. Hal ini tertuang dalam tupoksinya yang termuat dalam Peraturan Wali Kota Semarang No. 103 Tahun 2021 pasal 41 huruf f dan i yang menyatakan bahwa DLH bertugas menyiapkan kegiatan penyuluhan, pembinaan badan usaha dan masyarakat serta menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas pendamping kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup. Namun realitanya upaya penyuluhan yang dilakukan masih belum bisa menjangkau seluruh bank sampah yang eksis.

Sudah terdapat setidaknya 647 unit bank sampah yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Semarang hingga tahun 2025. Dengan mempertimbangkan begitu banyaknya jumlah bank sampah tersebut, DLH Kota Semarang menunjuk salah satu bank sampah di setiap kecamatan sebagai koordinator. Koordinator kecamatan tersebut berperan untuk mendampingi bank sampah unit yang ada. Meskipun DLH berharap bisa mendampingi langsung setiap bank sampah yang ada, karena hal tersebut merupakan salah satu tugasnya yang termuat dalam Perwalkot Semarang

No. 103 Tahun 2021 Pasal 41 huruf e yaitu, “menyiapkan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat pendukung kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.” Namun realitanya masih ditemukan bank sampah-bank sampah yang vakum atau mati suri atau tidak tertib melaksanakan laporan tonase sampah terkelola.

Bukan hanya dari koordinator kecamatan, DLH Kota Semarang juga memiliki empat (4) pendamping bank sampah unit. Setiap pendamping bertanggung jawab atas empat kecamatan. Sehingga hal tersebut akan memperjelas alur komunikasi dan koordinasi. Di sisi lain juga tidak menutup kemungkinan dari BSU menghubungi secara pribadi kepada pegawai dinas bahkan di luar hari dan jam kerja para pegawai DLH. Apalagi sudah terdapat *WhatsApp Group* untuk bank sampah se-Kota Semarang.

Persebaran bank sampah di Kota Semarang ditargetkan terbentuk satu bank sampah unit tiap rw-nya. Dengan jumlah sekarang, membutuhkan 800-an unit lagi yang terbentuk. Pembentukan dilakukan dengan legalisasi embrio-embrio bank sampah yang ada di masyarakat. Embrio tersebut bermaksud pada paguyuban masyarakat yang secara mandiri mengelola sampah mereka. Proses legalisasi biasanya dilakukan oleh masyarakat di kelurahan masing-masing. DLH Kota Semarang hanya mengetahui adanya bank sampah baru dari laporan koordinator kecamatan atau ketika melakukan kunjungan langsung seperti pada saat mengadakan FGD atau diundang untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan.

DLH tidak dapat memaksa masyarakat untuk membentuk dan menjalankan bank sampah karena sifatnya yang sosial. Laporan timbulan sampah di bank

sampah juga masih belum secara teratur dilaksanakan oleh pengurus bank sampah. Menurut penuturan dari pegawai DLH, sudah termasuk sangat bagus ketika laporan bisa mencapai 60% dari keseluruhan bank sampah yang ada. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah bank sampah yang eksis dengan bank sampah yang melaporkan tonase sampah terkelolanya.

Tabel 1. 4. Perbandingan Total Bank Sampah dengan Jumlah Bank Sampah yang Melaksanakan Laporan

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah bank sampah yang beroperasi	47*	225	497	647
Jumlah bank sampah yang melaporkan tonase sampah terkelola	104	129	87	138

Ket: *data tidak selaras

Sumber: RKPD Kota Semarang dan SIPSN, 2025

Legalitas yang dimiliki oleh bank sampah akan berguna bagi bank sampah itu sendiri. Setiap tahunnya DLH Kota Semarang melaksanakan pengadaan barang bagi bank sampah yang membutuhkan. Pengadaan bisa berbentuk alat kerja, transportasi, hingga gedung, yang disesuaikan dengan permintaan bank sampah. Meskipun, akan ada batasan jumlah yang diberikan karena anggaran dari pemerintah itu sendiri. Sehingga jika mencukupi permintaan, akan diberikan lagi pada tahun depannya.

Selain sebagai penanganan sampah, bank sampah yang berjalan dengan baik diharapkan juga berdampak pada sirkulasi ekonomi. Selain pemilahan dan penimbangan, inovasi seperti kreasi dari sampah juga bisa menambah nilai ekonomis sampah. DLH memberikan ruang saat *events* besarnya untuk

mempromosikan produk tersebut dengan pameran-pameran. Juga dengan menyarankan untuk menjual produknya melalui sosial media dan *e-commerce*.

Penjualan sampah merupakan hal utama dalam pengelolaan bank sampah. Namun pada realitanya, penjualan sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh bank sampah yang ada di masyarakat. Berdasarkan Jakstrada, salah satu strategi penanganan sampah rumah tangga adalah dengan penguatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan PermenLHK 14 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa kemitraan dengan dunia usaha baik dalam daur ulang sampah maupun dengan produsen bisa dilakukan dengan fasilitasi oleh pemerintah.

Beberapa bank sampah di Kota Semarang sudah memiliki mitra dalam aktivitasnya. Seperti kerja sama dengan Pegadaian, yang mana hasil penjualan sampah akan dikonversi dengan emas. Kemudian kemitraan dengan Rubricks yang mengubah sampah menjadi paving blok. Kemitraan lain juga dilakukan melalui CSR yang berbentuk pengadaan barang seperti alat-alat penunjang kegiatan pengolahan sampah hingga bangunan untuk aktivitas bank sampah.

Secara penjualan sampah, DLH Kota Semarang mengatakan belum adanya kemitraan yang tetap. Padahal ini merupakan salah satu tugasnya yang tercantum dalam Perwalkot Semarang No. 103 Tahun 2021 Pasal 41 huruf g. Penjualan sampah yang langsung ke pabrik-pabrik dilakukan oleh pengepul besar. Sehingga dari bank sampah hanya bisa menjual sampah yang dibutuhkan oleh pengepul. Untuk sampah lain yang belum bisa dijual, pada akhirnya akan menumpuk di

gudang dan bahkan dibuang lagi ke tpa. Kalaupun ada penjualan sampah yang jarang diminati, biasanya hanya bersifat sementara karena permintaan yang sedikit.

Bank sampah memiliki fungsi yang krusial dalam pengelolaan sampah di hulu berdasarkan penjelasan sebelumnya. Peran dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting sehingga di sisi lain pemerintah perlu terus menerus memberikan dukungan dan penyadaran. Peran pemerintah sudah banyak diatur melalui PermenLHK 21 Tahun 2021 dan Jakstrada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis peran pemerintah, yang dilaksanakan oleh DLH Kota Semarang, pada optimalisasi bank sampah. Sehingga penelitian “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Optimalisasi Bank Sampah di Kota Semarang” penting dilakukan.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Peran DLH untuk menemukan mitra tetap penjualan sampah pada jenis-jenis tertentu yang sulit dijual perlu disegerakan kembali.
2. Peran DLH perlu ditingkatkan dalam upayanya menyadarkan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah pada tingkat rumah tangga dan melakukan penabungan di bank sampah.
3. Monitoring dan pendampingan dari pemerintah perlu lebih dioptimalkan karena masih terdapat bank sampah yang sedang vakum atau mati suri.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap optimalisasi bank sampah di Kota Semarang?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap optimalisasi bank sampah di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap optimalisasi bank sampah di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap optimalisasi bank sampah di Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam optimalisasi bank sampah. Juga diharapkan dapat menjadi bahan pustaka bagi penelitian-penelitian yang terkait, terutama pada teori manajemen publik dan peran pemerintah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan bagi pemerintah dan masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan program bank sampah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi kepada seluruh pihak yang akan melakukan penelitian serupa.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Untuk membangun cara peneliti dalam melakukan penelitian ini, perlu adanya referensi penelitian yang serupa. Referensi-referensi berikut akan menambah pandangan peneliti terhadap permasalahan yang sudah dideskripsikan pada latar belakang. Sehingga hasil dari penelitian sebelumnya juga akan dapat menunjukkan keterkaitan berbagai hal, utamanya pada pengelolaan sampah dan bank sampah.

Tabel 1. 5. Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Tujuan	Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Abdussamad et al., (2022) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango	Untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango	Asas pada Perda Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan (Randall & Grace)	Metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif	(1). Implementasi bank sampah sebagai wujud pengelolaan sampah di Kantor DLH Kabupaten Bone Bolango diperhatikan melalui berbagai aspek yaitu tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, dan nilai ekonomi terlaksana dengan baik, tetapi belum memperlihatkan hasil. Adapun penghambat seperti keterbatasan gedung dan SDM, belum ada pengupahan, serta kurangnya pengawasan oleh pemerintah; (2). Faktor-faktor penentu yang mendorong program bank sampah dalam pengelolaan sampah di Kantor DLH Kabupaten Bone Bolango, diantaranya: tingkat kepatuhan, rutinitas fungsi dan kinerja. Secara keseluruhan memang masih kurang terlihat hasilnya karena minimnya sosialisasi dan pelatihan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
2.	Hani & Safitri (2019) Pengembangan Kapasitas Bank Sampah untuk	Mengetahui bagaimana pengembangan	Pengembangan Kapasitas (Grindle)	Metode penelitian deskriptif	(1) Dimensi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sistem rekrutmen yang tidak berjalan. Masih menggunakan tingkatan individual, padahal adanya sistem rekrutmen akan mendorong

	Mereduksi Sampah di Kota Tanjungpinang	kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang	Faktor <i>Capacity Building</i> (Riyadi, 2003)	dengan analisis kualitatif	terbentuknya kinerja yang optimal. (2) Dimensi Penguatan Organisasi. Sudah berfungsinya pemanfaatan personil. DLH mengeluarkan SK kepengurusan dan berupaya memanfaatkan pengelola bank sampah agar profesional dalam bekerja. (3) Dimensi reformasi kelembagaan, Secara terintegrasi dilaksanakan oleh seluruh OPD yang tertuang dalam program bank sampah. Salah satu nya dengan program bank sampah yang didirikan, melalui Perwali 43/2018. Di sisi lain, minimnya sosialisasi oleh pemerintah menjadikan beberapa masyarakat yang belum menanggapi program di Jakstrada ini.
3.	Pavitasari & Septiarani (2023) Rencana Pengelolaan sampah Melalui Optimalisasi Bank Sampah pada Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik	Merumuskan substansi rencana pengelolaan sampah melalui optimalisasi bank sampah di Desa Pudakpayung	Suryani dalam HAQQ (2018) 5 aspek dalam sistem pengelolaan sampah	Menggunakan metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif	Pengurangan timbulan sampah di Kelurahan Pudakpayung dengan adanya bank sampah mencapai 1,91% dari sampah yang potensial. Permasalahan sampah belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal ini dikarenakan pada pengelolaan sampah di bank sampah masih sedikit partisipasi masyarakatnya. Rencana pada studi ini sudah menampilkan dari tahun ke tahun, baik secara teknis maupun non teknis, hingga keterlibatan masyarakat yang mana nantinya di tahun 2040 akan mencapai 100%. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan perencanaan ini, diantaranya yaitu melalui sistem jemput bola dan pengadaan gedung bank sampah, intervensi masyarakat dan pemerintah dalam mendukung aktivitas bank sampah, dan menjalin hubungan ekonomi dengan CSR perusahaan produsen. Dengan rencana atau upaya memaksimalkan fungsi bank sampah tersebut diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan berpotensi mengurangi timbulan sampah.
4.	Septiani et al. (2019)	Menjelaskan sistem pengelolaan	Integrated Sustainable Waste	Metode kualitatif	Di Kota Salatiga, pada sistem pengelolaan sampah plastiknya, melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah sendiri yang berperan sebagai pengelola sampah kota, rumah tangga sebagai sumber

	Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga : Praktik dan Tantangan	sampah plastik di kota Salatiga berdasarkan peran para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah plastik	Management (Guerrero et al., 2013)	Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif	sampah, pemulung berperan untuk memilah sampah, hingga para pengepul dan bank sampah yang berperan untuk mengolah sampah plastik. Penanganan sampah di Kota Salatiga diupayakan pengelolaannya dengan mengarahkannya pada aktivitas penimbunan, daur ulang, dan pakai ulang. Dalam upaya untuk mengurangi konsumsi plastik pada masyarakat, selain dengan terus memupuk kesadaran lingkungan, juga dihadapkan pada sosial budaya masyarakat yang sulit untuk diubah. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah yang sangat penting melalui edukasi pilah sampah dan mengurangi perilaku menyampah ke masyarakat, menggandeng pemulung dan pengepul, mengoptimalkan kapasitas bank sampah, memfasilitasi kedua pihak tersebut, hingga berupaya maksimal dalam mengolah sampah residu yang tidak dapat terkelola sebelumnya.
5.	Suwerda et al. (2019) Pengelolaan Bank Sampah Berkelanjutan di Wilayah Perdesaan Kabupaten Bantul	Meneliti faktor-faktor intensi mengelola bank sampah yang berkelanjutan di wilayah perdesaan Kabupaten Bantul	Determinan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan	Kuantitatif Deskriptif	Diperoleh dua hubungan signifikan antara pengetahuan dan keterlibatan masyarakat maupun pada pengetahuan dan intensi perilaku mengelola sampah di bank sampah wilayah pedesaan Kabupaten Bantul melalui <i>path analysis</i> . Sehubungan dengan pengembangan bank sampah berkelanjutan, pemerintah dan JPSM memegang peranan tertinggi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk mengembangkan bank sampah yang <i>sustainable</i> diupayakan melalui peningkatan peran JPSM dan Pemerintah, intensi perilaku, partisipasi, dan pengetahuan masyarakat agar menabung sampah di bank sampah.
6.	Aisha (2023)	Menganalisis pengaruh Bank Sampah terhadap jumlah sampah	-	Kualitatif	(i) Pengurangan sampah plastik di Indonesia telah terbantu berkat peran dari bank sampah, baik dari perusahaan maupun pemerintah. Meninjau bahwasanya isu lingkungan terkait sampah plastik yang timbulannya sangat banyak, dengan adanya program Bank Sampah

	Pengaruh Bank Sampah Terhadap Jumlah Sampah Plastik di Indonesia	plastik di Indonesia			berprinsip 3R memudahkan pekerjaan untuk mengurangi sampah plastik. (ii) Peningkatan penabung sampah, terutama plastik, terwujud lebih cepat dan menambah ekonomi masyarakat didukung adanya keberadaan bank sampah dengan pemberian insentif. (iii) Konsep ekonomi sirkular yang menerapkan prinsip <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> tersampaikan dengan baik di masyarakat untuk melakukan sistem pengelolaan sampah plastik yang benar.
7.	Saputra et al. (2022) Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah di Bank Sampah	Mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Kota Pekanbaru	-	Kualitatif Fenomenologis	Partisipasi Pembentukan Keputusan dengan mengedukasi pilah sampah dari rumah kepada masyarakat dan ditabung ke Bank Sampah. Partisipasi Pelaksanaan sudah baik, namun masih terdapat kelemahan pada pemerataan sosialisasi pemerintah maupun pengelola juga dengan kesadaran masyarakatnya. Masih rendahnya persentase partisipasi pemanfaatan hasil oleh masyarakat, meskipun dampak positif dan manfaatnya bisa menambah penghasilan masyarakat serta mempunyai lingkungan yang sehat, bersih, dan tertata. Partisipasi masyarakat masih rendah karena bank sampah belum banyak diketahui dan bagaimana sistemnya. Juga ketika terdapat sosialisasi dari pihak pemerintah dan pengelola yang memiliki keterbatasan pada jumlah partisipan yang bisa ditampung di suatu wilayah. Sehingga hanya sebagian yang diwakili oleh ibu-ibu PKK atau ibu RT/RW-nya lah yang mengetahui di awal tentang adanya bank sampah. Juga kurangnya kesadaran masyarakat yang berfikir sampah masih menjadi tanggung jawab pemerintah.
8.	Susilowati & Herdiansyah (2019)	Menganalisis hubungan antara bank sampah dan sampah rumah	-	Pearson Correlation through	Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi sampah yang dikirim ke TPA adalah dengan membentuk bank sampah induk sebagai mitra pengelola, memperbarui peraturan sebelumnya dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di

	<i>Application of Waste Bank Use in Reducing Household Waste in Sub-Urban Area?</i>	tangga dalam pengurangan menuju TPA dan keuntungan finansial		literature studies	sumbernya, mendorong setiap RW untuk membentuk bank sampah dan memberikan insentif kepada masyarakat yang berinovasi dalam pengelolaan sampah. Langkah-langkah tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan indikator bertambahnya jumlah bank sampah di setiap kecamatan, bertambahnya jumlah sampah yang dikumpulkan di bank sampah untuk didaur ulang atau digunakan kembali, berkurangnya jumlah sampah yang dikirim ke TPA, dan meningkatnya nilai tambah dengan menjual sampah. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa jumlah bank sampah berkorelasi sangat kuat dengan berkurangnya sampah ke TPA, sehingga semakin banyak bank sampah maka semakin tinggi pula pengurangan sampah ke TPA. Tingginya jumlah bank sampah pasif menjadi tantangan bagi BSIP dan pemerintah daerah. Perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk mendorong aktivitas bank sampah. BSIP disarankan untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan PKK sebagai organisasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
9.	Muljaningsih et al. (2023) <i>Waste Bank Policy as Social Engineering Based on The Green Economy Concept in The Malang City, Indonesia</i>	Menganalisis kebijakan Bank Sampah Malang menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP)	-	Analytic Hierarchy Process (AHP)	Pertama, AHP terdiri dari kriteria, subkriteria, dan penetapan kebijakan berdasarkan konsep ekonomi hijau. Kedua, dengan menggunakan metode AHP, kami mencapai tujuan pemeringkatan strategis: 1 – inovasi, 2 – lingkungan sekitar yang mendukung, dan 3 – informasi yang lengkap. Temuan kami menyiratkan bahwa inovasi dalam pengelolaan sampah diperlukan untuk mendorong masyarakat mengelola sampah domestiknya dengan lebih baik dengan mengumpulkan sampah di BSM untuk ditukar dengan uang atau sembako; Dengan demikian, sampah dapat dikelola dengan baik, dikurangi, digunakan kembali, dan didaur ulang, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

10.	Mandpe et al. (2023) <i>Circular Economy Approach for Sustainable Solid Waste Management: A Developing Economy Perspective</i>	mengeksplorasi praktik terkini pengelolaan sampah dan menilai kekurangannya serta menjelaskan CE sebagai solusi	<i>Circular Economy</i>	<i>Literature Review</i>	Konsep <i>Circular Economy (CE)</i> dan keselarasan dengan <i>Solid waste Management (SWM)</i> dan <i>SDGs</i> menyediakan wawasan dan pendekatan baru. Hal ini diharapkan bahwa kepatuhan sampah nasional, UU yang berlaku, inisiatif oleh Pemerintah, dan pengaruh industri dan kerangka hukum tentang CE akan memfasilitasi sektor <i>SWM</i> India transisi menuju praktik berbasis CE. Sebelum dimulainya CE pada pengelolaan sampah, menganalisis kelayakan dengan mempertimbangkan pengolahan sampah, fasilitas dan evaluasi ekonomi menyeluruh merupakan yang terpenting.
11.	David et al. (2020) <i>Rethinking Sustainability: A Review of Liberia's Municipal Solid Waste Management Systems, Status, and Challenges</i>	Untuk menyoroti Kegiatan pengelolaan sampah saat ini di Liberia dan memberikan informasi kepada pembaca tentang tantangan yang dihadapi dan menghambat pengembangan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan	-	-	Sektor pengelolaan sampah kota di Liberia menghadapi tantangan besar dan kekhawatiran yang terus meningkat mengenai lemahnya pengelolaan sampah yang disebabkan oleh pengelolaan tidak efektif, kurangnya penerapan pengelolaan sampah, sistem pengumpulan tidak efektif, tidak ada pemilahan sampah, tidak ada data yang akurat mengenai jumlah dan komposisi timbunan sampah, dan kurang memadainya tindakan meminimalkan pencemaran lingkungan. Tantangan utama diantaranya tidak adanya kerangka kerja pengelolaan sampah terpadu yang mengakibatkan pembuangan sampah yang tidak tepat, TPA tidak memadai, kolaborasi <i>stakeholder</i> tidak efektif, kurangnya PPP terkait pengelolaan sampah, kurangnya implementasi daur ulang sampah, dan kurangnya insentif ekonomi, merupakan hal yang umum terjadi di sebagian besar negara berkembang. Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan di Liberia semakin terhambat oleh kurangnya dana, dukungan teknis, teknologi, dukungan kebijakan, rendahnya partisipasi publik, kurangnya edukasi, kurangnya pelatihan staf, dan kurangnya pengakuan sektor daur ulang informal.

12.	Setiyaningrum et al. (2022) <i>The Existence of Waste Bank Management and the Impact on The Environment and Trends of Community Consumption (Cas Study of The Ngudi Resik Waste Bank, Krecekan, Wironanggan, Sukoharjo)</i>	Mengetahui dampak lingkungan dari kehadiran bank sampah dan alokasi penghasilan tambahan yang didapatkan oleh masyarakat dari penjualan sampah.	-	Mix Methods dengan analisis deskriptif	Bank sampah Krecekan Ngudi Resik merupakan hasil inisiasi dari komunitas yang digerakkan oleh keinginan menciptakan lingkungan bersih. Pengelolaan bank sampah yang baik adalah kunci keberlanjutan bank sampah. Peranan penting juga dipegang oleh tokoh masyarakat melalui kehadiran dan dukungan dalam keberlanjutan bank sampah. Bank sampah Krecekan Ngudi Resik memberikan dampak positif berpengaruh terhadap aspek kebersihan lingkungan sehingga mendapat penghargaan dalam bentuk “Kampung Kompetisi Merdeka Sampah”. Selain itu, bank sampah ini juga membantu perekonomian masyarakat, karena mereka mendapatkan tambahan penghasilan yang dapat dimanfaatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga.
13.	Auliya & Arif (2021) Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro di Kabupaten Gresik	Mendeskripsikan Peran Dinas Koperindag dalam penanganan dampak pandemi pada UM di Kabupaten Gresik	Peran Pemerintah (Gede Diva, 2009)	Kualitatif Deskriptif	Melalui gform, Dinas Koperindag Kab. Gresik sebagai fasilitator, membantu mendata pelaku-pelaku usaha mikro yang nantinya diusulkan memperoleh bantuan dari negara berupa Bantuan Bagi Para Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Hal tersebut dilakukan karena ketika pandemi tidak boleh terjadi kerumunan. Penanganan dampak pandemi terhadap UMKM, khususnya usaha mikro, dilakukan oleh Dinas Koperindag Kab. Gresik yang berperan sebagai regulator dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), sebagai katalisator, Diskoperindag memberikan hibah daerah yang dijadikan dana permodalan bagi kelompok usaha mikro. Para pelaku usaha mikro di Kab. Gresik dapat bertahan di masa pandemi ini dikarenakan peran Diskoperindag dijalankan dengan baik.

Sumber: Diolah dari berbagai jurnal, 2024

Berdasarkan penjelasan dari Tabel 1.4 – Penelitian Terdahulu, kajian mengenai bank sampah sebagian besar ditujukan kepada kelembagaan bank sampah dan partisipasi masyarakat. Pada pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan dari hulu atau sumber sampah membutuhkan kontribusi dari masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah perlu memberikan dukungan dengan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan kebutuhan fasilitas.

Terdapat beberapa urgensi adanya bank sampah yang dijalankan oleh masyarakat. Diantaranya seperti perlunya pengurangan jumlah sampah yang diangkut menuju tempat pemrosesan akhir dan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Pengurangan jumlah sampah yang diangkut menuju TPA dapat ditangani dengan melakukan pemanfaatan ulang, baik melalui proses terlebih dahulu maupun tidak. Pemilahan sampah bisa dilakukan oleh masyarakat yang kemudian dijual ke pihak bank sampah dan dari bank sampah akan dijual lagi ke pihak yang membutuhkannya. Dari situ akan sampah-sampah tersebut memiliki nilai ekonomi untuk menambah pendapatan masyarakat.

Beberapa penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan dan keberlanjutan bank sampah. Sebagai program yang berbasis masyarakat, sirkulasi ekonomi menjadi salah satu cara pandang yang dipegang meskipun tujuan utamanya adalah pada pengelolaan sampah yang ditimbulkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, menjadi sangat jelas terdapat keterkaitan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu dengan administrasi publik.

1.5.2. Administrasi Publik

Menurut Stephen P. Robbins dalam Rahman (2017) administrasi adalah seluruh metode dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bertepatan guna melalui orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Trecker dalam Keban (2014) administrasi merupakan suatu metode yang selalu berubah dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dengan melakukan pemanfaatan manusia dan material melalui kerjasama. Menurut Luther Gullick dalam Rahman (2017) menyatakan bahwa administrasi adalah hal yang menyangkut tentang penerapan suatu aktivitas atau tugas dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Publik adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan pikiran, perasaan, tujuan, perilaku, dan perbuatan yang sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku, Nurcholis (Eka, 2017). Barton & Chapple dalam Rahman (2017) menyatakan bahwa administrasi publik dilihat sebagai suatu tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengertian ini menegaskan bahwa dalam memberikan pelayanan publik diperlukan adanya dimensi partisipasi pegawai. Pengertian administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014) adalah metode untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengatur keputusan-keputusan dalam kebijakan publik yang diorganisasikan oleh sumber daya dan petugas publik. Kemudian menurut Nicholas Henry dalam Keban (2014), administrasi publik adalah perpaduan antara teori dan pelaksanaannya dalam memberikan pemahaman terkait peran pemerintah dengan masyarakat serta memacu kebijakan publik untuk peka terhadap kepentingan sosial.

Beberapa pengertian dari ahli di atas, dapat dijabarkan bahwa administrasi publik menitikberatkan pada suatu kegiatan untuk melaksanakan pelayanan dalam mencapai sasaran atau target yang telah diagendakan sebelumnya melalui pembuatan kebijakan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa paradigma administrasi publik yang berbeda-beda menyesuaikan kebutuhan publik.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn dalam Keban (2014) paradigma adalah sudut pandang, pola atau prosedur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Paradigma administrasi publik mengalami perkembangan sebagai berikut:

a. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Asumsi utama dari paradigma ini adalah pandangan pemisahan fungsi politik dan administrasi pemerintahan sebagai strategi untuk efisiensi dan efektivitas. Menurut Goodnow dalam Keban (2014) menyatakan bahwa politik berfokus pada kebijakan untuk memenuhi kehendak rakyat, sedangkan administrasi memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan. Implikasinya yaitu administrasi dilihat sebagai sesuatu yang bernilai bebas dan ditujukan guna meraih nilai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan.

b. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini didasari oleh tokoh-tokoh manajemen klasik yaitu Fayol dan Taylor dalam Keban (2014) yang menyatakan bahwa fokus administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip administrasi. Prinsip ini dituangkan dalam identifikasi tujuh prinsip perencanaan administrasi menurut Gulick dan Urwick dalam Keban (2014) atau biasa disebut POSDCORB (*Planning, Organizing,*

Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting). Pandangan ini bersifat universal atau dapat diimplementasikan dimana saja, sehingga lebih menekankan fokus dibanding lokusnya.

c. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dalam paradigma ini, dikotomi administrasi dan politik dapat disangkal dengan alasan tidak dapat dipisahkannya administrasi dari politik dalam pemerintahan (Ikeanyibe et al., 2017). Selain itu, John Gaus dalam Keban (2014) menyatakan bahwa teori administrasi publik merupakan teori politik. Menurut Landau dalam (Ikeanyibe et al., 2017), administrasi publik pada periode perkembangannya hanya dianggap sebagai “bidang minat” atau persamaan dari ilmu politik. Sehingga lahir paradigma baru yang menyoroti bahwa administrasi publik merupakan ilmu politik yang lokusnya adalah birokrasi pemerintah dan fokusnya menjadi buram karena masih banyaknya kekurangan pada prinsip administrasi.

d. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma ini menekankan adanya pengembangan pada prinsip manajemen secara mendalam. Dalam paradigma ini berkembang dua arah orientasi yaitu yang orientasinya berkembang pada ilmu administrasi murni dan yang orientasinya pada kebijakan publik. Perkembangan seluruh fokus di dalam paradigma ini dihipotesiskan dapat diimplementasikan tidak hanya di dunia bisnis saja tetapi juga dalam administrasi publik. Maka dari itu, lokus di dalam paradigma ini tidak jelas (Keban, 2014).

e. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970- sekarang)

Dalam paradigma ini, adanya usaha untuk menegakkan kembali disiplin ilmu sebagai bidang studi yang independen. Fokus yang diidentifikasi paradigma ini adalah hierarki, sedangkan birokrasi bertransformasi seperti sektor swasta. Sehingga adanya pergeseran paradigma dari administrasi publik tradisional atau konvensional ke model NPM. Seperti pada paradigma sebelumnya, NPM hadir untuk memberikan efisiensi di dalam sistem administrasi. Pada paradigma administrasi publik tradisional lebih menekankan pemerintah sebagai aktor independen dan otoritatif di dalam birokrasi, namun pada paradigma NPM melibatkan sektor swasta (Ikeanyibe et al., 2017).

f. Tata Kelola / *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma *governance* ini dapat diartikan sebagai penerapan kekuasaan atau dominasi yang dilakukan oleh pemimpin politik dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya. Di dalam paradigma NPM, adanya keterlibatan aktor non pemerintah yaitu untuk meminimalisir anggaran, peningkatan efisiensi, serta membatasi kekuasaan pemerintah. Sedangkan dalam *governance*, selain untuk efisiensi, juga untuk meningkatkan partisipasi, mengakui kapabilitas jaringan dalam masyarakat sipil agar dapat mengelola secara mandiri suatu program yang diberikan pemerintah. Berbeda dengan NPM, fokus dari *governance* ialah menekankan peran aktor dan jaringan non-pemerintah dalam menghasilkan barang dan jasa publik serta untuk menyusun ulang peran sektor publik melalui keterlibatan warga dan tata kelola jaringan menurut Wu & He dalam Ikeanyibe et al. (2017).

1.5.4. Manajemen Publik

Dalam aspek administrasi publik maupun swasta, terdapat elemen, manfaat, pedoman yang saling bersangkutan dan berkelanjutan untuk meraih tujuan yang telah direncanakan (Hi. Ibrahim dan Supriatna 2019). Manajemen publik menurut Tilano dan Suwitri (2019) merupakan sekumpulan metode dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan mengawasi sumber daya organisasi dalam rangka meraih tujuan. Menurut Wijaya dan Danar (2014) pengertian manajemen publik adalah bagian dari administrasi publik yang secara spesifik membahas terkait dengan rancangan kegiatan, penataan organisasi, pendistribusian sumber daya dengan teknik penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumberdaya manusia, dan penilaian kegiatan dan audit.

Dalam manajemen publik, terdapat fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan. menurut Donovan dan Jackson dalam Keban (2014), meliputi perencanaan terkait dengan pembuatan, pengembangan, dan penilaian efektivitas kebijakan serta menganalisa lingkungan; pengorganisasian terkait dengan pembagian kerja setiap pegawai, *staffing* terkait dengan penerimaan, penyeleksian, pelatihan, serta penilaian pegawai, *leading* terkait dengan memotivasi serta memberikan iklim semangat kerja kepada pegawai dan *controlling* terkait dengan penetapan standar, membuat perubahan dalam meraih tujuan serta memajukan struktur dan proses tanggung jawab. Beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa manajemen publik merupakan serangkaian prosedur yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik atau nirlaba dalam mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen serta pendayagunaan sumber daya.

Peralihan paradigma dari *OPA* dimana pada paradigma ini birokrasi masih lamban, kaku, sentralistik dan struktur organisasi masih bersifat *top-down* bukan *bottom-up*. Pada paradigma ini hanya pemerintah saja yang menentukan keputusan kebijakan ataupun program sehingga belum tentu tujuan kebijakan tersebut berpihak kepada publik. Kemudian paradigma bergeser ke *new public management*, dimana dalam paradigma ini mulai melibatkan sektor swasta atau bisnis, dalam paradigma ini, birokrasi menerapkan pengetahuan dalam manajemen bisnis untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan performa pelayanan publik pada birokrasi modern menurut Vigoda dalam Keban (2014). Oleh karena itu, dalam paradigma ini lebih mengutamakan kinerja dan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan.

Selanjutnya dari *NPM* bergeser ke paradigma *new public service*, dimana paradigma ini menekankan bahwa birokrasi harus memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan pelanggan, dan memprioritaskan kebutuhan publik. Bergesernya paradigma pelayanan pelanggan menjadi pelayanan publik, merubah paradigma dari *government* menjadi *governance* (tata kelola). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mengatur urusan publik. *Governance* atau tata kelola ini menekankan keterlibatan, peran, dan jaringan berbagai pihak. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keputusan yang mengarah kepada kesepakatan dalam melaksanakan kebijakan publik, mengelola program dan aset publik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keterlibatan pemerintah berkaitan dengan Administrasi Publik guna mencapai dan memenuhi kepentingan dalam memberikan pelayanan kepada publik secara optimal.

1.5.5. Peran

Konsep mengenai peran akan melekat pada pembahasan yang berkaitan dengan suatu program atau kebijakan. Dalam strata sosial di masyarakat, pola perilaku yang dipunyai oleh seseorang dengan posisi tertentu sehingga dapat membawa perubahan yang bermanfaat untuk lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya merupakan pengertian dari peran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam (Wulandari, 2013).

Teori peran mempunyai hubungan dengan teori seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ilmu lainnya, menurut beberapa tokoh. Menurut Linton dalam (Hutami & Chariri, 2011) menurutnya teori peran menggambarkan interaksi antara aktor-aktor yang bertindak dan berperilaku sesuai dengan budaya yang telah ada, sebuah harapan akan coba diwujudkan melalui para aktor yang berupaya melalui perannya dalam harapan tersebut.

Soekanto dalam (Wulandari, 2013) menjelaskan bahwa pada suatu peristiwa tertentu di mana seseorang memiliki pola perilaku merupakan pengertian dari peran. Istilah tersebut diambil dari bagian yang berkembang dalam sebuah teater atau pertunjukkan dimana terdapat banyak pihak yang mempunyai posisi dan kedudukan tertentu, masing-masing dari mereka memiliki bagian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya namun tetap melakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk membangun cerita yang runtut, dinamis, dan harmonis dengan harapan akan sampai pada akhir cerita. Konsep peran disederhanakan menjadi tindakan seseorang yang mempunyai posisi atau kedudukan tertentu yang mana perilakunya berdasar harapan dan tanggung jawab yang diembannya.

1.5.6. Peran Pemerintah

Seperti dimaklumi, arti dari pembangunan umumnya adalah “usaha sadar yang dilakukan oleh pemerintah, negara, dan bangsa dengan maksud meraih tujuan nasional melalui perubahan dan pertumbuhan yang terencana menuju masyarakat modern” (Siagian, 2009). Harus diakui, dalam proses pembangunan nasional, pemerintah menguasai sebagian besar peranan, diantaranya:

1. Peran Selaku Stabilisator

Karakteristik negara berkembang ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Akan sulit mencoba menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan ketika kondisi kehidupan kenegaraan dan masyarakat yang tidak stabil. Oleh sebab itu, peran penting dimiliki pemerintah dalam rangka meraih stabilitas tersebut wajib dilaksanakan secara efektif.

Dalam suasana politik bangsa pemerintah harus menjamin tidak akan terjadi rongrongan dari politik dalam maupun luar negeri. Ketiadaan stabilitas dalam politik akan berakibat pada pembangunan yang tidak berlangsung dengan mantap. Menghadapi situasi politik yang labil, pemerintah harus berpedoman pada norma-norma demokrasi yang berlaku secara universal maupun nasional. Kemudian stabilitas ekonomi, yang berharap perekonomian nasional dapat terjaga, sehingga: (a) ekonomi tumbuh secara wajar, (b) suku bunga yang tidak tinggi, (c) rendahnya inflasi, (d) kesempatan berusaha makin luas, (e) proses industrialisasi berlangsung dengan baik, (f) kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kepentingan nasional, dan lain sebagainya.

Stabilitas pembangunan di bidang sosial-budaya mempunyai sasaran utama membentuk bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa menghilangkan jati dirin. Peran tersebut dapat terwujud dengan: (a) pandai dalam menyeleksi, (b) proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, (c) jalur pendidikan, (d) siasat yang persuasif, dan (e) strategi bertahap yang berkelanjutan, tidak perlu "loncatan jauh ke depan" (quantum leap).

2. Peran Selaku Inovator

Inovasi bisa dikatakan menjadi salah satu hasil dari kreativitas. Dilihat pada segi administrasi pembangunan, inovasi memiliki arti temuan, metode, sistem, dan cara berpikir baru. Yang mana hal tersebut berasal dari pemerintah selaku inovator. Supaya sukses menjalankan peran ini, prakondisi harus dipenuhi pemerintah dengan memiliki legitimasi yang tinggi sehingga penyerapan dan penerimaan masyarakat terhadap hal-hal baru akan lebih mudah, yang mana akan membantu jalannya transformasi.

Di samping legitimasi, perhatian serius diperlukan pada tiga hal lainnya,

- a. Birokrasi pemerintah sudah lebih dulu diterapkan inovasi
- b. Inovasi yang sifatnya konsepsional
- c. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja

3. Peran Selaku Modernisator

Berbagai implikasi negara yang modern diantaranya seperti mandiri, tangguh, dan diakui setara oleh negara-negara lain. Agar hal tersebut dapat tercipta, dibutuhkan hal-hal berikut: (a) Ilmu pengetahuan dan teknologi dikuasai, (b) kemampuan dan keterampilan manajerial, (c) kemampuan

memberikan nilai tambah yang tinggi melalui pengolahan kekayaan alam negeri, (d) sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, (e) pondasi kokoh dan demokratis dalam kehidupan politik, (f) masa depan yang jelas sesuai dengan visi yang sudah diciptakan, (g) rakyat yang mampu menentukan secara rasional bagaimana “nasibnya” melalui pemberdayaan, (h) keberanian mengambil risiko, dan (i) berpandangan masa depan, serta (j) terbuka terhadap perubahan.

4. Peran Selaku Pelopor

Sebelumnya sudah diusik mengenai penerapan inovasi yang terlebih dahulu diterapkan oleh pemerintah dalam birokrasinya. Itulah yang dimaksud dengan peran selaku pelopor yang dimainkan oleh pemerintah pada beragam sektor bernegara. Oleh karena itu, masyarakat harus merasakan pemerintah bisa menjadi panutan bagi mereka. Misalnya: (a) memberikan contoh dengan kerja tekun dan produktif, memanfaatkan waktu seefisien mungkin, dan orientasi kinerja yang optimal. (b) menjadi pioneer dalam disiplin kerja seperti menaati jam kerja, (c) menjadi teladan dalam kesadaran untuk melestarikan lingkungan seperti melakukan daur ulang sampah dan tidak menyampah di tempat sekitar, (d) memelopori keadilan yang diterapkan secara objektif terhadap orang lain tanpa diskriminasi, (e) memelopori kehidupan yang efisien dengan menerapkan pola hidup hemat dan rajin menabung, dan (f) memelopori keterbaruan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara reguler dengan maksud agar terjadi pembaruan pengetahuan dan keterampilan. Dan masih banyak lagi

5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Beragam pelaksanaan aktivitas pembangunan tidak selalu hanya menjadi tanggung jawab dan beban bagi pemerintah, melalui berbagai kriteria memang harus secara mandiri dilaksanakan oleh pemerintah. Kriteria seperti keamanan bangsa dan negara, keterbatasan modal, belum memadainya kapabilitas masyarakat, tidak ada minat dari masyarakat, dan secara regulasi juga merupakan kewenangan pemerintah, merupakan alasan bagi pemerintah untuk menjadi pelaksana sendiri.

Pelaksanaan tersebut dapat dilihat pada bidang-bidang tertentu. Bidang pertahanan merupakan sektor yang seutuhnya menjadi kewenangan pemerintah melalui pembangunan angkatan bersenjata. Sektor perhubungan, pendidikan, dan kesehatan, juga menjadi salah satu tanggung jawab besar yang dimiliki oleh pemerintah meskipun pada sektor ini masih memungkinkan adanya peran swasta. Peran swasta pada tiga sektor tersebut akan terbatas pada hal-hal yang *profitable* seperti seharusnya bagaimana cara swasta bekerja. Namun, tetap hal-hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, sekaligus hak yang harus diperoleh masyarakat.

1.5.7. Faktor Pendorong dan Penghambat Manajemen Pemerintahan

Banyak faktor, baik internal maupun eksternal, yang mengakibatkan perubahan pada pelaksanaan manajemen pemerintahan. Meskipun begitu, setidaknya terdapat tiga faktor dominan yang perlu dikaji yaitu faktor fungsional, faktor struktural dan faktor kultural (Nugrahaningsih et al., 2023).

1. Perubahan struktural.

Selaras dengan paradigma Reinventing Government dan penerapan demokrasi akan tercipta transformasi hubungan struktural dan kewenangan yang lebih luas. Hal tersebut secara lebih leluasa harus diusahakan oleh pemerintah untuk mengatur rumah tangganya. Kebanyakan kebijakan yang dilaksanakan merupakan keputusan politik oleh setiap pemenang pemilu, sehingga posisi birokrasi dalam hal ini selalu pada pihak yang netral.

2. Perubahan Fungsional.

Terjadi perubahan besar pada manajemen pemerintahan setelah konsep Regom dari David Osborne yang menjual transformasi pola pikir swasta diterapkan, yang mana isinya adalah meminimalkan peranan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat serta efisiensi sektor pemerintahan. Dibutuhkan perubahan pada pendekatan pelayanan yang diberikan seiring dengan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Salah satunya adalah memberdayakan dinas yang menjadi indikator bahwa otonomi direalisasikan secara bertanggung jawab. Dinas yang memiliki kewenangan pada urusan tertentu merupakan inti dari pelaksanaan pendelegasian di pemerintahan.

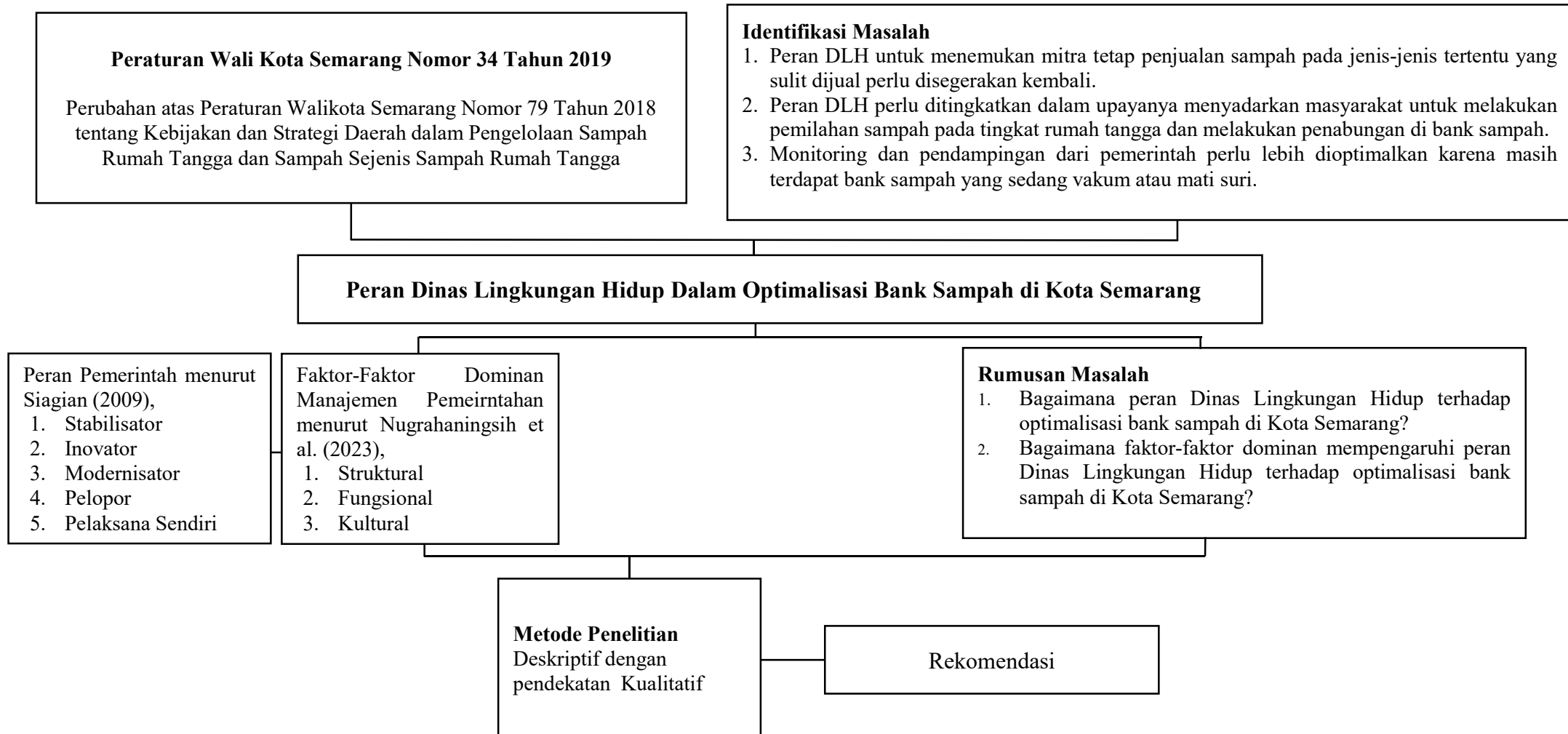
3. Perubahan Kultural

Ada tiga pendekatan dalam menjalankan strategi kultural yaitu: kebiasaan lama yang relevan dengan zaman harus segera ditinggalkan (*breaking habits*), Penawaran kepada masyarakat terhadap perubahan diupayakan bisa meraih lubuk hati terdalam agar bisa diterima (*touching hearts*) dan meneukan cara

untuk melakukan transfer *mindset* baru yang sesuai dengan visi yang dicitakan (*winning minds*).

Seluruh aspek dapat tercakup oleh perubahan struktural, fungsional, dan kultural pada manajemen pemerintahan, aspek utamanya yaitu: Manajemen Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Keuangan, Logistik, dan Konflik. Faktor-faktor dominan dalam manajemen pemerintahan perlu dipertimbangkan dalam merencanakan dan melaksanakan program agar peran pemerintah optimal dan tujuan program dapat tercapai dengan baik.

1.6. Kerangka Pikir Penelitian



1.7. Operasionalisasi Konsep

Agar rumusan masalah pada penelitian ini dapat terjawab, peneliti menganalisis intervensi pemerintah dalam mengoptimalkan peran bank sampah di Kota Semarang dengan langkah awal melalui peran pemerintah, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh DLH Kota Semarang. Peran Pemerintah dapat ditelaah menggunakan lima peranan berikut, yaitu:

1. Stabilisator

Peran ini berkaitan dengan perannya dalam menjaga kestabilan bank sampah melalui upaya untuk memastikan pengelolaan bank sampah dan mendorong masyarakat agar mendukung program tersebut.

2. Inovator

Pemerintah berperan sebagai pihak yang menjadi sumber keterbaruan sekaligus berupaya untuk men-*transfer*-nya kepada masyarakat dalam hal metode, sistem, dan cara berpikir pengelolaan sampah melalui bank sampah.

3. Modernisator

Pemerintah berperan untuk transformasi kepada masyarakat dan/atau pengurus bank sampah untuk memiliki keterampilan dalam mengelola bank sampah..

4. Pelopor

Pemerintah sebagai garda terdepan sekaligus inisiator yang memacu masyarakat untuk melakukan pengelolaan bank sampah dan sampah dengan baik dan benar

5. Pelaksana Sendiri

DLH mengambil peran dan tanggung jawab pada sektor-sektor tertentu yang tidak dapat diberikan sebagian atau sepenuhnya kepada pihak swasta atau masyarakat sesuai dengan tupoksinya.

Selain menganalisis peran pemerintah dalam mengintervensi bank sampah di Kota Semarang, dalam penelitian ini juga akan dianalisis terkait dengan faktor-faktor dominan yang dapat menyebabkan berubahnya pengelolaan bank sampah, melalui tiga faktor yaitu:

1. Perubahan Struktural

Perubahan ini berkaitan dengan peran dan kewenangan lembaga pemerintah yang mendukung keberhasilan dalam usahanya mengoptimalkan bank sampah.

2. Perubahan Fungsional

Perubahan ini berkaitan dengan fungsi yang dimiliki oleh pelaksana-pelaksana program bank sampah yang pada praktiknya saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang didasarkan pada berbagai regulasi yang mendukung.

3. Perubahan Kultural

Perubahan ini berkaitan dengan cara berpikir dan kebiasaan individu maupun kelompok di dalam masyarakat yang akan berpengaruh pada pelaksanaan program bank sampah di Kota Semarang.

Tabel 1. 6. Tabel Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub-Fenomena	Gejala
Peran Dinas Lingkungan Hidup	Stabilisator	1. Konsistensi DLH dalam memastikan bank sampah terkelola dengan baik. 2. Konsistensi DLH untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai nasabah bank sampah.
	Inovator	Kemampuan DLH dalam mentransfer model baru pengelolaan sampah melalui bank sampah dalam hal: 1. Konsep bank sampah 2. Sistem bank sampah 3. Prosedur dan metode bank sampah
	Modernisator	Kemampuan DLH untuk mengupayakan transformasi pengelolaan sampah melalui bank sampah dalam hal: 1. Penguasaan IPTEK 2. Kemampuan manajerial 3. Peningkatan kesadaran masyarakat supaya berorientasi masa depan
	Pelopor	1. Intervensi DLH dalam pembentukan bank sampah. 2. Kebijakan DLH dalam memastikan keaktifan bank sampah.

		3. Intervensi DLH untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai nasabah bank sampah
	Pelaksana Sendiri	1. Pengelolaan sampah di DLH Kota Semarang 2. Intervensi DLH melalui fasilitasi kemitraan bersama pihak ketiga.
Faktor Dominan yang Mempengaruhi Manajemen Pemerintahan	Perubahan Struktural	1. Regulasi 2. Efisiensi birokrasi 3. <i>Political Will</i> 4. Kapabilitas
	Perubahan Fungsional	1. Efektivitas kinerja 2. Tugas pokok dan fungsi 3. Regulasi 4. Kerja sama antarinstansi
	Perubahan Kultural	1. Penerimaan 2. Pola pikir 3. Kebiasaan 4. Pemberdayaan masyarakat

1.8. Argumen Penelitian

Administrasi publik menitikberatkan pada suatu kegiatan untuk melaksanakan pelayanan dalam mencapai target yang telah diagendakan sebelumnya melalui pembuatan kebijakan. Menurut Henry dalam Keban (2014), administrasi publik adalah perpaduan antara teori dan pelaksanaannya dalam memberikan pemahaman terkait peran pemerintah dengan masyarakat serta memacu kebijakan publik untuk peka terhadap kepentingan sosial. Untuk melaksanakan suatu kebijakan publik memerlukan pengelolaan agar terselenggara dengan efektif dan efisien. Menurut Tilano dan Suwitri (2019) manajemen publik merupakan sekumpulan metode dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan mengawasi sumber daya yang ada dalam rangka meraih tujuan.

Soekanto dalam (Wulandari, 2013) menerangkan bahwa peran adalah *part* yang diperagakan oleh seseorang berupa pola perilaku atau tindakan yang terjadi pada suatu peristiwa tertentu. Hal ini tentunya juga berlaku pada peran pemerintah dalam suatu program yang dijalankan. Menurut Siagian (2009), pemerintah memerankan sebagai pihak dominan pada proses pembangunan nasional. Peran yang dimainkan oleh pemerintah diantaranya sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Namun di sisi lain, menurut Nugrahaningsih et al (2023), proses manajemen pemerintahan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dominan yaitu perubahan struktural, fungsional, dan kultural.

Riset terdahulu digunakan pada riset ini untuk menambah wawasan dalam membantu keberhasilan riset. Penelitian dilakukan oleh M. Hani dan Dian P. Safitri

(2019) yang berjudul Pengembangan Kapasitas Bank Sampah untuk Mereduksi Sampah di Kota Tanjungpinang. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas bank sampah untuk mereduksi sampah di Kota Tanjungpinang dengan teori pengembangan kapasitas oleh Grindle. Salah satu temuannya yaitu terdapat masyarakat yang belum mengetahui program bank sampah karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Penelitian lain dilakukan oleh B. Suwerda, S. R. Hardoyo, dan Andri Kurniawan (2019) dengan judul Pengelolaan Bank Sampah Berkelanjutan di Wilayah Perdesaan Kabupaten Bantul. Riset ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk meneliti faktor-faktor intensi mengelola bank sampah yang berkelanjutan di wilayah perdesaan Kabupaten Bantul dengan berpusat pada determinan pengelolaan sampah berkelanjutan menurut Ajzen (1991). Berdasarkan hasil *path analysis*, terdapat dua hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan partisipasi masyarakat serta pengetahuan dengan intensi perilaku mengelola sampah. Sehubungan dengan pengembangan bank sampah berkelanjutan, pemerintah dan JPSPM memegang peranan tertinggi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Model pengembangannya dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, partisipasi, intensi perilaku masyarakat menabung sampah serta meningkatkan peran JPSPM dan Pemerintah.

Optimalisasi bank sampah di Kota Semarang mengalami permasalahan yang salah satunya dikarenakan peran pemerintah yang direpresentasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu ditingkatkan. Permasalahan ini dijabarkan menjadi tiga yaitu, belum optimalnya peran DLH dalam, melakukan

fasilitasi kemitraan tetap dalam penjualan sampah pada jenis-jenis tertentu, dan upaya penyadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah pada tingkat rumah tangga hingga melakukan penabungan di bank sampah, serta kurangnya optimalnya monitoring dan pendampingan dari pemerintah karena masih terdapat bank sampah yang sedang vakum atau mati suri. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dan faktor yang mempengaruhi manajemennya pada upaya optimalisasi bank sampah di Kota Semarang. Dengan begitu, penelitian ini penting untuk dilakukan.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang mana pengumpulan data didapatkan dari tulisan dan gambar. Penelitian kualitatif menonjolkan analisisnya melalui proses pengambilan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif tetap berusaha menemukan jawaban pada pertanyaan penelitian dengan cara berpikir formal dan argumentatif dengan dukungan data kuantitatif namun tidak melakukan pengujian hipotesis.

1.9.2. Tipe Penelitian

Rumusan masalah penelitian mengarahkan pada menjelaskan dan menganalisis yang berarti tipe penelitian deskriptif akan sesuai. Penelitian ini akan melakukan pendalaman situasi sosial, terutama pada lingkup

pemerintah sebagai pemangku kewenangan. Penyajian penelitian akan dilakukan dengan menjelaskan situasi yang ada sesuai dengan hasil temuan di lapangan sehingga pantas dikategorikan sebagai tipe penelitian deskriptif. Situasi yang akan digambarkan pada penelitian ini adalah terkait dengan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam optimalisasi bank sampah di Kota Semarang.

1.9.3. Situs Penelitian

Situs penelitian memiliki arti sebagai lokasi atau tempat dimana peneliti akan melakukan proses pengumpulan fakta dan data terkait dengan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ditentukan, maka lokus penelitian yang akan didatangi oleh peneliti adalah Kantor DLH Kota Semarang dan Bank Sampah Unit di Kota Semarang.

1.9.4. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian kualitatif adalah situasi atau fakta lapangan yang ditemukan yang terbentuk secara konstruktif oleh elemen-elemen yang ada. Menurut Spradley, elemen yang membentuk situasi atau fakta lapangan tersebut adalah tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*). Dalam penelitian dikenal narasumber, partisipan, ataupun informan sebagai subjek maupun objek penelitian karena perannya sebagai pemberi informasi kepada peneliti.

Subjek penelitian dipilih melalui *purposive sampling*, diantaranya adalah:

1. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Sub Koordinator Bidang Kearifan Lokal dan Pemberdayaan
2. Koordinator Kecamatan Bank Sampah Unit di Kota Semarang
3. Ketua Bank Sampah Unit di Kota Semarang

1.9.5. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data empiris yang diperoleh melalui fakta dan data yang diperoleh langsung pada saat melakukan observasi sehingga kriteria data masuk ke dalam data yang valid. Data yang valid memiliki dua sifat yakni reliabel dan obyektif. Reliabilitas data dapat ditemukan pada aktivitas manusia yang konsisten dalam jangka waktu tertentu. Kemudian obyektivitas data merupakan kesepakatan yang diyakini secara umum. Namun data yang bersifat reliabel dan obyektif belum tentu termasuk dalam data yang valid.

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dari orang yang menjadi informan wawancara menjadi sumber utamanya. Pendokumentasian sumber utama lewat wawancara atau pengamatan merupakan hasil dari gabungan aktivitas yang dilihat, didengar, dan dijabarkan. Perhatian peneliti akan terfokus pada peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam optimalisasi bank sampah di Kota Semarang. Peneliti seyogyanya bisa mewawancarai orang-orang yang sudah dijadikan informan guna mendapatkan

informasi mengenai situasi wilayah tersebut. Saat kegiatan wawancara berlangsung, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah ditentukan dan mendokumentasikan jawaban dari informan yang nantinya akan menjadi data penelitian.

b. Sumber Tertulis

Moleong (2010) menerangkan bahwasanya dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber tertulis pada penelitian ini didapatkan pada beberapa buku, internet, dan dokumen resmi yang akan diperoleh melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Bank Sampah Unit, dan berbagai instansi yang relevan.

c. Foto

Foto bisa kerap kali dipakai untuk memeriksa sisi subjektif dan menghasilkan data deskriptif yang cukup berarti yang hasilnya dianalisis secara induktif (Moleong, 2010). Foto yang bisa dipakai di penelitian kualitatif adalah foto yang didokumentasikan oleh peneliti dan keakuratannya akan dipengaruhi oleh waktu pengambilan foto tersebut sehingga bisa mencerminkan keadaan yang lebih tepat. Foto digunakan pada penelitian merupakan foto yang dihasilkan oleh peneliti itu sendiri, bukan oleh orang lain yang berasumsi agar peneliti dapat memperoleh data sesuai dengan interpretasi peneliti sendiri.

d. Data Statistik

Sumber data tambahan pada penelitian kualitatif bisa menggunakan data statistik. Data ini bisa saja menggambarkan kecenderungan subjek pada realitas lapangan. Peneliti. Untuk membantu analisis dalam penelitian ini, akan memakai data statistik sebagai data pembantu dan pelengkap.

1.9.6. Sumber Data

Sumber data dapat dikelompokkan kepada data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui observasi langsung yang bersifat empiris dan melakukan wawancara terhadap informan yang relevan. Dalam penelitian ini, data primernya didapatkan melalui pengamatan terhadap mekanisme kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan wawancara terhadap pejabat di dinas tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Peneliti akan memperoleh data sekunder biasanya melalui sumber-sumber literatur seperti dokumen perencanaan dan laporan, penelitian terdahulu, dan sumber lain yang memiliki hubungan dengan tujuan penelitian.

1.9.7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan langkah seperti observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dan dokumen kualitatif. Proses pengumpulan data akan menemukan titik jenuh atau informasi dari informan sudah tidak didapatkan lagi sedangkan masih terdapat banyak pertanyaan yang perlu digali sehingga teknik pengumpulan data akan menggunakan *snowball*. Informan *snowball* dapat ditemukan kepada pengurus bank sampah yang masuk ke dalam struktural dan pemerintah terdekat seperti kelurahan dan kecamatan.

1.9.8. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dilakukan agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan akurat. Pengolahan data sangat diperlukan untuk menemukan jawaban atas masalah yang dirumuskan di antara banyaknya temuan dan data yang diperoleh atas hasil observasi. Analisis data menurut Miles & Huberman terdiri atas tiga langkah, yakni reduksi data, penyuguhan data, dan pengambilan kesimpulan.

Tahap reduksi dilakukan dengan cara memberikan kode pada data yang diperoleh. Hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengelompokkan (kategorisasi) data guna penggunaan yang akurat. Tahapan ini juga merupakan tahapan untuk seleksi data yang relevan dan menilai urgensi data. Reduksi data dilakukan dengan memberikan simpulan umum yang nanti akan diidentifikasi makna dasarnya. Hasil tersebut akan menghasilkan kategorisasi data yang sesuai dan terstruktur.

Data yang didapatkan kemudian akan diolah untuk ditampilkan dalam bentuk deskripsi, diagram, tabel, dan sebagainya. Adanya tampilan yang rapi dan terstruktur akan memperjelas makna dari banyaknya data yang diperoleh. Penelitian kualitatif, pada umumnya, menggunakan penyajian yang deskriptif terhadap pengolahan data yang ditemukan.

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang cukup penting berdasarkan data-data yang disajikan. Penarikan kesimpulan pada pendekatan kualitatif tidak ditujukan kepada penerapan kesimpulan yang umum. Kesimpulan ini akan menjadi temuan baru untuk dapat dikembangkan menjadi hipotesis pada penelitian lanjutan.

1.9.9. Kualitas Data

Kualitas dan validitas data dilakukan agar hasil penelitian yang dilakukan bersifat akurat dan aktual. Wiersma menjelaskan triangulasi sebagai proses validasi silang dengan menilai pada sumber dan proses perolehan data. Triangulasi terdiri atas tiga kategori penilaian yaitu sumber data, cara perolehan, dan waktu penemuan data. Penilaian sumber data adalah dengan membandingkan data yang sama dengan sumber yang berbeda. Penilaian cara memperoleh data dinilai melalui membandingkan temuan pada observasi dengan temuan pada saat wawancara informan. Penilaian waktu akan menguji kebenaran data pada waktu dan situasi yang berbeda secara berulang untuk mendapatkan kepastian data.